



Jumlah permohonan informasi publik yang diterima di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak **2886** permintaan informasi.

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI



Diagram Rekapitulasi Permintaan Informasi

Berdasarkan diagram diatas, permintaan informasi yang diterima oleh PPID Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2020 sebanyak 2.886 permintaan informasi dari berbagai kanal-kanal dengan rincian sebagai berikut:

Call Center	: 165	Website	: 1988
SMS	: 76	Whatsapp	: 489
Email	: 13	Facebook	: 96
Surat	: 3	Twitter	: 15
Kunjungan Langsung	: 10	Lapor.go.id	: 31

Tabel 1.1 Data Isu dan Sub Isu Permohonan Informasi Melalui Aplikasi Sipemandu Desa

Isu	Sub Isu	Total
Aplikasi Kemendesa	E-DMC	13
	SIPEDA	1
	SIPEMANDU	4
	Sistem Informasi Desa	4
Bansos	Null	600
Bantuan Langsung Tunai	Informasi Umum BLT	740
	Informasi pendataan BLT	365
Dana Desa	Informasi Penggunaan Dana Desa	376
	Informasi Umum Dana desa	272
Lainnya	Bukan Kewenangan	132
	Internal Kementerian	10
Program Kementerian Desa	Bumdes	32
	Desa Tanggap Covid	3
	Embung Desa	1
	Gerakan Masker Setengah Miliar	237
	Indeks Desa Membangun	13
	Informasi Bantuan Pembangunan Desa	8
	PID	2
	PKTD	33
	Pendamping Desa	16
	Permohonan Bantuan Pembangunan Desa	1
Transmigrasi	Bantuan Transmigrasi	1
	Informasi Transmigrasi	22
Total		2,886

Dari data tersebut, permohonan informasi yang masuk ke aplikasi Sipemandu Desa terdapat isu terkait aplikasi kemendesa, bansos, bantuan langsung tunai, dana desa, lainnya (bukan kewenangan), program kementerian desa dan transmigrasi.

Dari tabel diatas menjelaskan tentang, isu tentang aplikasi kemendesa memiliki sub isu terkait E-DMC, Sipede, Sipemandu, dan sistem informasi desa. Isu bansos memiliki banyak permohonan informasi namun dalam hal ini masyarakat masih belum bisa membedakan bahwa bansos bukan kewenangan dari Kementerian Desa, PDTT. Bantuan langsung tunai memiliki sub isu informasi umum BLT dan informasi pendataan BLT. Dana desa memiliki sub isu informasi penggunaan dana desa dan informasi umum dana desa. Lainnya dalam hal ini memiliki pengertian menanyakan informasi dan setelah di analisis permohonan informasi tersebut bukan kewenangan Kementerian Desa, PDTT dan internal kementerian. Terkait isu program kementerian desa, terdapat sub isu bumdes, desa tanggap covid, embung desa, gerakan masker setengah milyar, IDM, informasi bantuan pembangunan desa, PD, PKTD, pendamping desa, dan permohonan bantuan pembangunan desa. Permohonan informasi transmigrasi memiliki sub isu bantuan transmigrasi dan informasi transmigrasi.